PERLINDUNGAN MEREK BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KUE BANGKIT DI KOTA PEKANBARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Emilda Firdaus, Maryati Bachtiar

ABSTRAK

Munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan dari organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundangan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tarif and Trade*, GATT). Merek adalah suatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan diri para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah di gunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentu membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

PENDAHULUAN

Merek merupakan karya intelektual yang akrab hubungannya dengan investasi, perdagangan dan industri. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan investasi, perdagangan dan industri tersebut sebagai pengaruh globalisasi, merek menjadi simbol kualitas suatu produk tertentu. Hampir tidak ada komoditas dalam perdagangan internasional yang tidak mengandung unsur merek, disamping unsur-unsur HaKI lainnya seperti Paten, Desain atau Hak Cipta. Mengingat akan pentingnya unsur "merek" dalam perdagangan, maka tuntutan perlindungan terhadap merek menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan oleh negara.

Provinsi Riau khususnya Pekanbaru sangat banyak sekali menghasilkan berbagai macam industri, seperti industri kerajinan, makanan dan minuman. Di Pekanbaru sendiri sampai saat ini masih sedikit sekali pengusaha yang telah mendaftarkan merek dagangnya, padahal dalam hal pemasaran sudah banyak hasil industri Riau yang di ekspor ke berbagai negara, misalnya seperti jenis makanan oleh-oleh khas Riau di Pekanbaru. Hasil-hasil produksi makanan khas Riau tersebut adalah seperti kue bangkit, bolu kembojo, keripik pisang, keripik nanas, kerupuk bayam, roti jala, lempuk durian dan lain sebagainya.

Semakin banyaknya industri makanan yang ada, baik yang merupakan makanan khas maupun panganan lainnya, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan diantara pengusaha industri makanan, termasuk pada industri makanan kue bangkit yang ada di Pekanbaru. Pada dasarnya persaingan yang sehat dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, namun tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak tertentu yang mencoba meniru atau menjiplak merek-merek yang ada. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menghendaki persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

Pengusaha industri makanan di Kota Pekanbaru cukup banyak, namun yang telah mendaftarkan mereknya sangat sedikit sekali. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya baru 1 (satu) industri kue bangkit yang telah memiliki sertifikat merek di Kota Pekanbaru.

Faktor penyebab sedikitnya jumlah pendaftaran tersebut disebabkan karena kurangnya

kesadaran dan pemahaman pengusaha di bidang industri makanan tentang arti pentingnya pendaftaran merek tersebut, bahkan pemilik merek tidak bersedia untuk mendaftarkan mereknya karena terbentur masalah biaya pendaftaran yang dirasakan cukup tinggi.

Jika keadaan tersebut tidak diantisipasi lebih dini oleh pihak-pihak yang berwenang, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya berbagai kerugian atas peniruan merek, atau pelanggaran merek lainnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kecuali ada pengalihan hak atas merek.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka judul tulisan ini adalah "PERLINDUNGAN MEREK BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KUE BANGKIT DI KOTA PEKANBARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK".

Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek bagi pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek bagi pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek bagi pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris), yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1996). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis sosiologis, karena penelitian ini langsung dilakukan di lokasi penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek bagi pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas di lapangan mengenai bagaimana tentang pelaksanaan perlindungan hukum merek bagi pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru.

Sumber Data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui pihak-pihak mempunyai keterkaitan secara langsung dalam penelitian ini. Responden tersebut adalah pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Penyuluhan dan Bantuan Konsultasi Hukum Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen serta keterangan dari literatur buku-buku yang menunjang penelitian ini. Adapun buku-buku dan perundang-undangan yang menjadi literatur adalah yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Merek.
- c. Data Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Observasi, yaitu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian, dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah Kota Pekanbaru.

- b. Kuisioner, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden, yaitu pengusaha industri kue bangkit untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan.
- c. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan melalui tanya jawab dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Bantuan Konsultasi Hukum Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku, yang dapat memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Data yang telah dikumpulkan baik berupa kuisioner dan wawancara, lalu diolah dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk wacana kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu suatu analisa yang dilakukan peneliti terhadap hasil data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan menghubungkan antara data-data dengan teori-teori dan pendapat para ahli yang relevan, dan akhirnya memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Bambang Sunggono, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih kondusif baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan, yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi perdagangan bebas, maka perlu adanya pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap HaKI, khususnya di bidang Merek.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan pemilik merek memperoleh perlindungan khusus dari negara atas merek yang telah didaftarkan tersebut.

Sebuah merek yang dapat dilindungi oleh Undang-undang Merek apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Telah melakukan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI atau melalui Departemen Hukum dan HAM apabila itu di daerah, dengan memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu :
 - a. Merek itu harus mempunyai daya pembeda;
 - b. -Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
 - c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
 - e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.
2. Apabila telah memenuhi unsur di atas dan diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, maka pemilik merek mendapatkan bukti kepemilikan merek, yaitu berupa Sertifikat Merek dan secara otomatis telah mendapatkan Hak Eksklusif (hak atas merek) terhadap merek yang didaftarkannya.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek yang penulis teliti adalah mengenai merek dagang dari industri usaha kue bangkit.

pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Pada Usaha Industri Kue Bangkit berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Kota Pekanbaru

Merek dagang dari industri makanan dan minuman yang ada di Pekanbaru cukup banyak dan dapat diberikan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perlindungan itu dikenal sebagai perlindungan hak atas merek. Adapun perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak atas merek dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadinya peniruan, pembajakan, pemalsuan, pengambilalihan merek serta mencegah agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan.

Perlindungan atas merek dagang terhadap industri kue bangkit ini dilakukan oleh karena pada saat ini sudah semakin banyaknya merek-merek industri kue bangkit yang menjamur di Kota Pekanbaru. Di Riau sendiri khususnya di Kota Pekanbaru, merek-merek kue bangkit mampu bersaing dengan merek-merek kue bangkit dari daerah lain.

Perlindungan hukum terhadap merek berlangsung untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dan Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain, maka orang tersebut wajib memperoleh izin dari orang yang berhak, yaitu orang yang mendaftarkan dan memiliki hak atas merek tersebut atau yang memperoleh hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi, yaitu hak (kepemilikan) yang dimiliki oleh setiap orang yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hak keuangan, hak perdagangan, sedangkan hak moral, yaitu hak yang dimiliki oleh tiap individu mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai kewajiban, perbuatan yang menjadikan seseorang tetap berdisiplin, maksudnya adalah melindungi orang yang memiliki barang atau karya tersebut.

Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya atau pemalsuan, menyerupai Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran HaKI khususnya merek oleh orang yang tidak berhak, jika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perlindungan hukum atas HaKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

1. Subjek perlindungan, yaitu pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
2. Objek perlindungan, yaitu semua jenis HaKI yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Varietas Baru Tanaman.
3. Pendaftaran perlindungan, yaitu hak yang sudah terdaftar, ditandai dengan sertifikat pendaftaran.
4. Jangka waktu perlindungan, yaitu jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HaKI itu dilindungi oleh undang-undang.

5. Tindakan hukum perlindungan, yaitu apabila telah terbukti adanya pelanggaran HaKI, maka pelaku pelanggaran harus di hukum baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum diberikan terhadap hak atas merek secara individual atau kelompok apabila merek tersebut telah didaftarkan langsung ke Direktorat Jenderal HKI atau pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan mendaftarkan merek tersebut pada tempat yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu tolak ukur dalam melihat apakah undang-undang tersebut pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal atau belum mengenai pendaftaran ataupun permohonan pendaftaran, jika pelaku usaha industri atau pemilik merek tidak mendaftarkan merek dari barang atau produk yang dihasilkannya, berarti hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum diterapkan sebagaimana layaknya. Berdasarkan indikator ini maka dapat diketahui apakah undang-undang ini berjalan efektif atau tidak.

Pendaftaran merek terhadap industri kue bangkit ternyata belum memasyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikit sekalnya pemilik usaha kue bangkit yang mendaftarkan mereknya di Jakarta maupun pada Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau, juga dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap 3 (tiga) pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru, dimana hanya ada 1 (satu) pelaku usaha tersebut yang mendaftarkan mereknya, sebagai bukti dari penelitian dapat dilihat berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penulis dengan responden tentang apakah merek kue bangkit tersebut telah didaftarkan, jawaban responden dapat dilihat pada Tabel I di bawah ini:

Tabel I. Jawaban Responden Pengusaha Kue Bangkit Apakah Merek Mereka Telah Didaftarkan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sudah	1	33,3%
2	Belum	2	66,7%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data di atas, hanya 1 (satu) pengusaha industri kue bangkit yang telah mendaftarkan merek dagang usahanya, yaitu sebesar 33,3% yang secara langsung mendaftarkan mereknya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, yaitu kue bangkit Merek Syempana dan telah memperoleh sertifikat Merek.

Perlindungan hukum pada dasarnya hanya diberikan kepada seseorang atau badan yang telah mendaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek dan kepada pemilik merek yang beritikad baik karena dibutuhkan pergaulan yang tertib dalam dunia usaha yang jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal permintaan pendaftaran dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sedikitnya jumlah merek yang dapat dilindungi juga disebabkan karena sistem pendataan yang tidak *on line* antara Kantor Merek yang ada di Pusat maupun dengan yang ada di daerah, sehingga jumlah merek yang terdaftar untuk Kota Pekanbaru tidak dapat diketahui jumlah pastinya, karena ada beberapa merek yang didaftarkan langsung ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, sebab sampai akhir tahun 2007 jumlah merek yang melakukan pendaftaran melalui Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Riau saja hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) dan hanya 2 (dua) industri makanan yang telah memiliki sertifikat merek.

Berdasarkan uraian di atas, pendaftaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan mendaftarkan mereknya kepada Departemen Hukum dan HAM maka dapat membawa nilai keuntungan bagi yang bersangkutan, sehingga dari segi positif pendaftaran merek itu juga dapat dirasakan oleh pemilik merek atau pelaku usaha, sebab :

- a. Pemegang hak atas merek atau pemohon akan mendapatkan surat pendaftaran merek yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau sementara.
- b. Apabila terjadi sengketa mengenai hak atas merek, pada umumnya merek yang telah terdaftar mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pada merek yang belum terdaftar, minimal pembuktian lebih mudah karena dalam Daftar Umum Merek (DUM) telah tercantum sejumlah data dan keterangan yang menyangkut merek tersebut.
- c. Pelaku usaha atau pemilik hak atas merek (hak eksklusif) mendapatkan kepastian hukum mengenai mereknya. Pengalihan hak atas merek atau pewarisan dan sebagainya. Posedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar dari pada yang belum terdaftar.

Mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku usaha industri kue bangkit dilakukan dengan sistem pendaftaran, karena salah satu tujuan utama dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada merek dan pemilik merek dari pemalsuan, peniruan, pengambil alihan dari suatu merek dalam menciptakan persaingan yang sehat di dalam perdagangan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, bahwa sejauh ini masih sedikit sekali pelaku usaha kue bangkit yang mendaftarkan merek dari hasil industri kue bangkitnya, hal ini mungkin disebabkan karena ketidaktahuan pelaku usaha terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam hal pelaksanaan di bidang merek yang menjadi tujuan atau cita-cita dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha kue bangkit atau pemegang hak atas merek dan merek dagangnya dapat dikatakan belum optimal terlaksana semestinya, karena sedikitnya para pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagangnya ke Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek belum terealisasi sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai arti pentingnya perlindungan HaKI termasuk Merek pada khususnya, sangat membutuhkan perhatian yang serius sebab mengingat perlindungan hukum terhadap merek akan menunjang pengembangan usaha pelaku usaha kue bangkit atau bagi pemegang hak eksklusif untuk terhindar dari pemalsuan, peniruan, pembajakan merek secara khusus dan meningkatkan pembangunan ekonomi serta persaingan yang sehat dalam perdagangan secara umum.

Faktor-faktor yang Menjadikan Pelaku Usaha Kue Bangkit di Kota Pekanbaru tidak Mendaftarkan Merek Dagangnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat 4 (empat) hal yang menjadikan pelaku usaha kue bangkit di Pekanbaru tidak mendaftarkan merek dagangnya, yaitu:

- a. Tidak adanya atau kurangnya pemahaman pelaku usaha kue bangkit di Kota Pekanbaru tentang merek dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pelaku usaha kue bangkit yang tidak mengetahui atau tidak memahami Undang-undang Merek

mengakibatkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Kurangnya pemahaman pelaku usaha kue bangkit terhadap Undang-undang Merek akan berimplikasi kepada realisasinya.

Mengenai kurangnya pemahaman pelaku usaha kue bangkit terhadap arti pentingnya merek, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi Penyuluhan dan Bantuan Konsultasi Hukum yang menyatakan bahwa di daerah Kota Pekanbaru memang disadari pelaku usaha kue bangkit kurang mengetahui keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, walaupun diantara beberapa pelaku usaha kue bangkit ada yang mengetahui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini, tetapi pemahamannya masih belum jelas. Hal ini dapat dibuktikan sebagai contoh dari seseorang yang ingin mendaftarkan merek dagangnya, sering meminta kepada Kantor Departemen Hukum dan HAM agar merek dagangnya bisa dipatenkan, di sini terlihat dari cara berpikir pelaku usaha yang menyamakan pengertian antara Hak Paten dengan Hak Merek. Selain itu juga masih terdapat pemikiran masyarakat khususnya pelaku usaha kue bangkit yang mengatakan dengan berjualan saja tanpa mendaftarkan merek dagangnya juga sudah bisa menghasilkan uang. Oleh karena cara berpikiran seperti itu, menyebabkan pelaku usaha kue bangkit enggan untuk mengurus masalah-masalah pendaftaran merek dagangnya, sebab hal tersebut akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya responden, pelaku usaha kue bangkit masih banyak yang kurang mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang merek.

Hal ini dapat dibuktikan melalui kuisisioner yang penulis tujukan kepada pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru dalam bentuk Tabel II di bawah ini:

Tabel II. Jawaban Pengusaha Industri Kue Bangkit tentang Mengetahui atau Tidak Mengetahui Apa yang Dimaksud dengan Merek

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	1	33,3%
2	Tidak Mengetahui	2	66,7%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Mengenai ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan merek adalah karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru tentang tujuan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut.

Adapun jenis merek usaha kue bangkit yang terdapat di Kota Pekanbaru dan yang penulis teliti ini adalah termasuk ke dalam jenis merek dagang dan merek biasa, yaitu merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, seperti merek pada kue bangkit ini. Sedangkan merek biasa, yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Salah satu penggolongan merek biasa, yaitu kue bangkit Cempaka Ayu, Kembang Melati.

Tabel III. Jawaban Responden Pengusaha Industri Kue Bangkit tentang Pernah atau Tidak Mengetahui jika Mereknya dilindungi Oleh Undang-undang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya, mengetahui	1	33,3%
2	Tidak mengetahui	2	66,7%
Jumlah		3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data dan informasi dari hasil kuisisioner di atas dapat diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat khususnya bagi kalangan pengusaha industri kue bangkit yang tidak memahami dan mengetahui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau dengan kata lain masih rendahnya tingkat pemahaman pengusaha tersebut tentang merek tersebut pada lapisan masyarakat industri kecil.

Pada dasarnya banyak dari para pengusaha yang tidak mengetahui bahwa mereknya dilindungi, dan untuk mendapatkan perlindungan itu sendiri perlu dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu.

Mengenai perlindungan merek ini dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diatur pada Pasal 3 dan Pasal 28 yang berbunyi:

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Adapun untuk jangka waktu perlindungannya diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang"

Pasal-pasal tersebut di atas telah menerangkan dengan jelas tentang perlindungan hukum terhadap merek, namun karena ketidaktahuan pengusaha kue bangkit terhadap hal ini, maka perlindungan hukum atas merek hanya diberikan terhadap merek yang telah terdaftar dan telah memperoleh sertifikat merek untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru diketahui bahwa dalam hal ini masih banyak diantara pengusaha industri kue bangkit yang merasa senang apabila merek dagangnya tersebut ditiru oleh orang lain dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja.

Hasil penelitian penulis terhadap reponden pengusaha kue bangkit berdasarkan jawaban kuisisioner yang diperoleh, bukti mengenai adanya perasaan senang apabila merek dagang industri kue bangkit tersebut ditiru oleh orang lain, hal ini dapat dilihat pada Tabel IV di bawah ini.

Tabel IV. Jawaban Responden Pengusaha Industri Kue Bangkit yang Merasa Senang jika Mereknya Ditiru Oleh Orang Lain

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya, senang	2	66,7%
2	Tidak senang	1	33,3%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) responden atau sebesar 66,7% merasa senang kalau merek dagang dari industri kue bangkit tersebut ditiru oleh orang lain, 2 (dua) responden yang mengatakan senang jika mereknya ditiru oleh orang lain dikarenakan pengusaha kue bangkit tersebut belum mendaftarkan mereknya dan tidak mengetahui kalau mereknya dilindungi undang-undang, dan yang sisanya tidak senang karena pengusaha tersebut telah mendaftarkan mereknya dan telah tercatat dalam Daftar Umum Merek dengan nomor registrasi : 545552. Hal ini jelas akan merugikan pengusaha industri kue bangkit. Berdasarkan data tersebut dapat penulis ketahui bahwa hal ini cukup mempengaruhi kelangsungan usaha kue bangkit tersebut, karena kalau merek industri tersebut ditiru, pengusaha kue bangkit tidak akan memperoleh keuntungan yang maksimal.

- b. Masih kurangnya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada masyarakat khususnya pengusaha kue bangkit yang memang sangat berkaitan erat dengan diberlakukannya undang-undang ini.

Selama berjalannya Undang-undang Merek yang baru ini, yang sudah tujuh tahun, sosialisasi dari undang-undang ini masih sangat lamban. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden sendiri apakah pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah khususnya instansi yang berkompeten dengan masalah merek sendiri, dan jawaban dari responden tersebut dapat dilihat pada Tabel V berikut ini :

Tabel V. Jawaban Responden Pengusaha Industri Kue Bangkit Tentang Tidak mendaftarkan Merek ini Karena Tidak Tahu Kalau Merek tersebut Dilindungi Oleh Undang-undang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya, mendaftar	1	33,3%
2	Tidak mendaftar	2	66,7%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) orang responden atau sebesar 66,7% yang menyatakan bahwa mereka tidak mendaftarkan karena tidak mengetahui kalau merek industri tersebut bisa dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Bantuan Konsultasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau menyatakan dapat diperoleh informasi

bahwa Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau telah melakukan survey atau kunjungan ke berbagai tempat usaha industri di Pekanbaru untuk mencoba mengenalkan arti pentingnya hukum merek kepada pelaku usaha industri tersebut, tetapi jawaban pelaku usaha tersebut umumnya mengatakan kalau merek dagang dari usaha kue bangkit tersebut telah didaftarkan di Dinas Kesehatan dan tidak perlu mendaftarkan merek lagi. Hal inilah salah satu kendala yang dihadapi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam melakukan pengenalan hukum merek kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa keterlambatan sosialisasi dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini menyebabkan masyarakat dalam hal ini pengusaha kue bangkit tidak mengetahui secara pasti dengan adanya undang-undang tersebut, sehingga berdampak kepada ketidakinginan dari para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek yang pelaku usaha kue bangkit miliki, sehingga secara tidak langsung perlindungan hukumnya berjalan kurang maksimal.

Pendaftaran merek bagi usaha industri ini sangat perlu di teliti agar ada kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel VI. Jawaban Reponden tentang Pernah atau Tidak Mendapat Penyuluhan Tentang Merek

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	1	33,3%
2	Tidak Pernah	2	66,7%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) responden yang ada, hanya satu yang pernah mendapatkan penyuluhan mengenai merek itu sendiri, sedangkan 2 (dua) responden lainnya menyatakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan mengenai merek, bahkan kedua responden ketika penulis menganjurkan untuk mendaftarkan mereknya, namun pengusaha kue bangkit tersebut malah menanyakan apa saja keuntungan apabila merek industri kue bangkit tersebut didaftarkan, dan apa hanya sekedar mendapatkan sertifikat saja.

- c. Masih adanya pemikiran Pengusaha Industri kue bangkit di Kota Pekanbaru yang masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan pelaku usaha kue bangkit enggan untuk mendaftarkan mereknya. Hal ini ditandai dengan pandangan pengusaha industri kue bangkit yang menganggap perlindungan merek pada suatu usahanya tidaklah perlu untuk dipikirkan. Sebagai contoh yang ada di masyarakat Indonesia khususnya pengusaha kue bangkit, seperti walaupun usaha makanan itu ada dan dijual di pasaran tanpa menggunakan merek, tetap saja makanan itu laku dan itu sudah lebih dari cukup untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, walaupun tanpa terdaftar mereknya, padahal hal itu sangatlah keliru karena dengan didaftarkannya merek pada usaha tertentu baik itu barang atau jasa bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Selain mereknya dapat dilindungi, pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya juga mendapat suatu penghargaan khusus yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha tersebut, yaitu berupa piagam atau sertifikat khusus dan merek tersebut telah lebih diakui di masyarakat sehingga para konsumen merasa tidak was-was lagi menggunakan merek

dari produk yang telah produsen jual kepada konsumen tersebut.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan, walaupun ini merupakan hal yang klasik namun cukup mempengaruhi, yaitu pola pikir dari masyarakat khususnya pelaku usaha kue bangkit yang tergolong kepada pemikiran yang kurang dan tidak sadar akan pentingnya arti hukum dalam melindungi dan menjaga hasil suatu karya atau ciptaan, hal itu ditandai dengan sumber daya manusia Indonesia yang rendah. Berbeda halnya dengan negara-negara yang telah maju dimana pola pemikiran masyarakatnya sudah maju dan tinggi sumber daya manusia.

Permasalahan yang timbul atas ketidaktahuan dan serta pemikiran masyarakat yang tergolong rendah tentang manfaat dan kegunaan dari pendaftaran merek ini perlu mendapat perhatian serius dari Ditjen HKI dan Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau.

Kesulitan yang dihadapi dalam pengertian pemikiran pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru yang masih tergolong rendah ini, yaitu karena faktor budaya masyarakat yang masih cenderung menganggap sebagai suatu hak masyarakat umum dan bukan suatu hak pribadi yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.

Adanya sistem kekerabatan yang masih bersifat komunal (kebersamaan) masih sangat kental juga mewarnai pemikiran pelaku usaha tersebut, sehingga sebagian di antara pengusaha industri kue bangkit tidak memperdulikan hak mereka dan anggapan senangpun masih pelaku usaha tersebut miliki apabila mereka dapat ditiru oleh orang lain.

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan cara menghilangkan sikap budaya masyarakat yang cenderung menganggap hasil karyanya sebagai hak masyarakat umum dan bukan hak pribadi, karena ini dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri dan menghambat kreativitasnya apabila mereka ditiru, dibajak oleh orang lain.

d. Biaya pendaftaran yang cukup besar

Berdasarkan beberapa faktor di atas yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya, faktor inilah yang sangat menjadi pertimbangan pengusaha kue bangkit di Kota Pekanbaru untuk tidak mendaftarkan merek dagangnya karena pendaftaran merek memerlukan biaya yang cukup besar, bahkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan belum mencapai hasil yang maksimal, sementara merek dagang produksi mereka semakin hari semakin dikenal masyarakat.

Hasil penelitian penulis terhadap reponden pengusaha kue bangkit berdasarkan jawaban kuisisioner yang diperoleh, bukti mengenai besar atau tidaknya biaya pendaftaran merek ini, hal ini dapat dilihat pada Tabel VII di bawah ini:

Tabel VII. Jawaban Responden Pengusaha Industri Kue Bangkit mengenai besar atau tidaknya biaya pendaftaran merek

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya, Besar	2	66,7%
2	Tidak Besar	1	33,3%
	Jumlah	3	100%

Sumber Data : Data Lapangan, Tahun 2008

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) responden atau sebesar 66,7% menyatakan biaya pendaftaran merek cukup besar, sedangkan 1 (satu) responden mengatakan tidak besar dikarenakan pengusaha kue bangkit tersebut mendaftarkannya langsung ke Ditjen HKI yang ada di Jakarta.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan merek dalam arti negatif (pemalsuan merek), maka dipandang perlu untuk membentuk dan menerapkan suatu sistem pemberian dan pendaftaran merek dengan tujuan agar pemilik merek mendapatkan perlindungan dari perbuatan curang yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena di Indonesia dan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hukum akan diberikan apabila telah di daftarkan mereknya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Departemen Hukum dan HAM dan kemudian akan memperoleh sertifikat merek.

Untuk mencegah agar tidak terjadinya pemalsuan, peniruan, pembajakan seperti di atas, maka pengusaha kue bangkit wajib mendaftarkan merek dagangnya agar tidak dirugikan, maka dilakukan upaya penanggulangan biaya pendaftaran, yaitu pemerintah dalam hal ini Ditjen HKI dan Departemen Hukum dan HAM mengurangi biaya pendaftaran merek khusus untuk industri-industri kecil dan menengah yang sesuai dengan modal dan keuntungannya atau membuat pengklasifikasian biaya pendaftaran merek dari industri kecil hingga perusahaan besar, sehingga bagi golongan industri kecil yang ingin mendaftarkan mereknya tidak perlu khawatir.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Merek pada Industri Kue Bangkit di Kota Pekanbaru

Guna terciptanya persaingan usaha yang baik dan sehat dalam dunia perdagangan perlu kiranya peran pemerintah agar terciptanya ketertiban dalam dunia usaha, agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan langkah konkrit dari pemerintah itu sendiri. Mengenai merek, yang memang sangat besar peranannya dalam perkembangan dunia usaha, sejauh ini sudah ada beberapa langkah dan upaya dari pemerintah agar pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 itu berjalan sesuai dengan tujuannya.

Adapun upaya pemerintah tersebut, yaitu :

1. Memberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat khususnya pengusaha kue bangkit yang ada di Kota Pekanbaru dan juga pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan merek dan mengadakan penyuluhan langsung ke lapangan yang dilakukan secara bertahap, sehingga seiring dengan berjalannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dapat mempengaruhi masyarakat khususnya pengusaha industri kue bangkit agar mau mendaftarkan merek dagang industrinya dan juga memberikan pengertian akan pentingnya arti merek dalam dunia perdagangan.

Upaya ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Departemen Hukum dan HAM yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada tiap-tiap pelaku usaha industri makanan dan minuman yang ada di Pekanbaru, namun belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan, dikarenakan para pelaku usaha yang ada di Pekanbaru kebanyakan dari industri kecil dan menengah yang pemikirannya masih tergolong rendah dan tradisional dan para pelaku usaha menganggap asalkan industrinya tersebut memperoleh untung, maka itu sudah lebih dari cukup.

2. Guna tersosialisasinya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dengan baik, maka pemerintah juga telah mulai mengadakan seminar-seminar dan lokakarya tentang merek,

sehingga sosialisasi dari undang-undang ini dapat berjalan dengan baik, yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian berupa informasi yang diberikan oleh Ditjen HKI atau melalui Departemen Hukum dan HAM yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kepada tiap-tiap pelaku usaha kue bangkit yang ada di Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan mereknya, apabila hal tersebut telah terlaksana dan pelaku usaha telah mendaftarkan mereknya barulah bisa terjadi perlindungan hukum pada merek dari industri kue bangkit tersebut.

Penulis menyadari benar bahwa kelahiran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini tidaklah semata-mata untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikannya saja, tetapi memiliki tujuan yang positif demi tercapainya ketertiban dan keadilan di bidang merek dan HaKI pada umumnya.

Hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah masalah sosialisasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk menginformasikan merek-merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui dan menghindari adanya tuntutan terhadap mereknya. Hambatan dari sosialisasi ini adalah sosialisasi belum dilakukan secara terprogram, sehingga hak merek tersebut benar-benar diketahui dan dipahami oleh masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha kue bangkit.

3. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pendaftaran untuk mendapat hak atas merek tersebut dan memberikan sanksi-sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar hak atas merek tersebut, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan bantuan dana kepada pengusaha-pengusaha kue bangkit yang ada di Pekanbaru karena biaya yang diperlukan untuk pendaftaran merek cukup mahal dan besar, ini dikarenakan kue bangkit juga merupakan makanan khas yang terdapat dari daerah Riau dan kue bangkit juga bisa dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat daerah lain yang telah berkunjung ke Kota Pekanbaru.

Upaya ini juga sudah mulai berjalan, dikarenakan pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah memberikan bantuan dana kepada para pengusaha industri kecil dan menengah khususnya industri kue bangkit, yang mana kue bangkit juga merupakan salah satu makanan khas dari daerah Riau untuk mendaftarkan merek dagangnya. Pemerintah juga sudah memberikan sanksi yang tegas berupa denda dan kurungan terhadap pelanggar hak atas merek. Upaya ini menurut penulis sangat efektif, dimana pemerintah melindungi hak atas merek dari merek tersebut dan juga melindungi pengusaha dari persaingan yang tidak sehat dalam dunia perdagangan.

4. Membentuk sentra-sentra Hak atas Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia dengan cepat yang dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang Merek kepada pengusaha-pengusaha yang bertujuan untuk melayani apabila ada pihak yang ingin mendaftarkan merek dagangnya.
5. Upaya yang paling penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek adalah dengan menghilangkan sikap budaya masyarakat yang cenderung menganggap hasil karyanya sebagai hak masyarakat umum dan bukan pribadi, karena ini dapat merugikan pengusaha kue bangkit itu sendiri dari segi ekonomis dan menghambat kreativitasnya apabila mereknya diambil, dibajak, ditiru oleh orang lain.

Upaya ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan apabila ada kesadaran hukum di dalam diri masyarakat tersebut, dan tidak memandang sebelah mata arti pentingnya sebuah pendaftaran merek.

Apabila hal ini telah tertanam di tiap-tiap diri masyarakat khususnya pelaku usaha kue bangkit, maka penulis yakin akan terciptanya hukum yang kondusif dan dapat mempercepat pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek pada industri usaha kue bangkit di Kota Pekanbaru belum terealisasi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan masih sedikit sekalinya permohonan pendaftaran merek dagang pada industri kue bangkit yang diajukan ke Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau. Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek industri kue bangkit sama halnya dengan prosedur permohonan hak atas merek lainnya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek baru terlaksana apabila adanya pendaftaran dari orang, badan, perusahaan yang mendaftarkan merek dagang atau merek jasa yang beritikad baik ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau di Departemen Hukum dan HAM jika itu di provinsi, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku saat ini.
2. Adapun Faktor-faktor yang menjadikan pelaku usaha kue bangkit di Kota Pekanbaru tidak mendaftarkan merek dagangnya, yaitu :
 - a. Tidak adanya atau kurangnya pemahaman pelaku usaha kue bangkit di Kota Pekanbaru tentang merek dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - b. Masih kurangnya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek kepada masyarakat khususnya pengusaha kue bangkit yang memang sangat berkaitan erat dengan diberlakukannya undang-undang ini, dari faktor tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terhadap industri kue bangkit di Kota Pekanbaru belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Masih adanya pemikiran pengusaha industri kue bangkit di Kota Pekanbaru yang masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan pelaku usaha kue bangkit enggan untuk mendaftarkan mereknya.
 - d. Biaya pendaftaran yang cukup besar.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Merek pada Industri Kue Bangkit di Kota Pekanbaru, yaitu:
 - a. Memberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat khususnya pengusaha kue bangkit yang ada di Kota Pekanbaru dan juga pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan merek dan mengadakan penyuluhan langsung ke lapangan yang dilakukan secara bertahap.
 - b. Guna tersosialisasinya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dengan baik, maka pemerintah juga telah mulai mengadakan seminar-seminar dan lokakarya tentang merek, sehingga sosialisasi dari undang-undang ini dapat berjalan dengan baik, yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian berupa informasi yang diberikan oleh Ditjen HKI atau melalui Departemen Hukum dan HAM yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - c. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pendaftaran untuk mendapat hak atas merek tersebut dan memberikan sanksi-sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar hak atas merek

tersebut, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan bantuan dana kepada pengusaha-pengusaha kue bangkit yang ada di Pekanbaru karena biaya yang diperlukan untuk pendaftaran merek cukup mahal dan besar.

- d. Membentuk sentra-sentra Hak atas Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia dengan cepat yang dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang merek kepada pengusaha-pengusaha yang bertujuan untuk melayani apabila ada pihak yang ingin mendaftarkan merek dagangnya.
- e. Upaya yang paling penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek adalah dengan menghilangkan sikap budaya masyarakat yang cenderung menganggap hasil karyanya sebagai hak masyarakat umum dan bukan hak pribadi.

Rekomendasi

Mengenai hal efektifnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada industri kue bangkit, agar lebih terealisasi kepada masyarakat maka perlu suatu upaya, yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat khususnya pengusaha kue bangkit yang ada di Kota Pekanbaru dan juga pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan merek dan mengadakan penyuluhan langsung ke lapangan yang dilakukan secara bertahap, yaitu melalui seminar-seminar, penyuluhan hukum maupaun lokakarya atau forum-forum lainnya.
- b. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pendaftaran untuk mendapat hak atas merek tersebut dan memberikan sanksi-sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar hak atas merek tersebut.
- c. Dalam hal ini pemerintah yaitu Direktorat Jenderal HKI dan Departemen Hukum dan HAM dianjurkan agar dapat memprogramkan dan membuat perencanaan yang maksimal untuk pensosialisasian merek kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha kue bangkit di Kota Pekanbaru yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga masyarakat benar-benar dapat mengetahui dan memahami secara maksimal tentang merek.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek